

3.1.3.8.2. Biro Hukum

Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Biro Hukum Pada Tahun Anggaran 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.031.206.453,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.872.955.815,- atau 92.20% dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja (Perjanjian Kinerja)	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Diselesaikan	Perda : 100% Pergub : 100% Kepgub : 100% Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota : 100%	Perda : 9 Pergub : 41 Kepgub: 906 Draft/ rancangan produk hukum daerah kab/kota yang difasilitasi : 112	104.4% 140%
	Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Persentase penanganan perkara yang diselesaikan 2. Persentase bantuan hukum yang diselesaikan	Perkara : 10 Bantuan advokasi : 8	Perkara : 12 Bantuan advokasi : 8	120% 100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	BB 71,50% Baik (88)	BB 71,03% 98.04	BB (101.13) 111.4%

2. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

- a. Sasaran I : Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan, dengan indikator kinerja yaitu :

1) Jumlah produk hukum yang ditetapkan :

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Daerah	10	9	90%
2.	Peraturan Gubernur	40	41	102.5%
3.	Keputusan Gubernur	750	906	120.8%

No.	Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Draft/rancangan produk hukum daerah kab/kota yang difasilitasi dan dievaluasi.	88	112	140%

Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- a) Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

(1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan dengan output kegiatan sebagai berikut : 9 Perda, 41 Peraturan Gubernur, 906 Keputusan Gubernur.

(2) Fasilitasi Bantuan Hukum, dengan output kegiatan ini :

- Tersalurkannya bantuan advokasi hukum bagi masyarakat miskin pada tahun 2023 dari target yang ditetapkan sebanyak 8 bantuan, dapat terealisasi sebanyak 8 bantuan yang berasal dari 4 kantor/organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Kantor Hukum (LBH) FIAT JUSTITIA BATUSANGKAR, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTA SOLOK) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN KOTO BARU), dan LBH Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM).
- Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang merupakan RANHAM Generasi V berfokus dan

berorientasi pada pemenuhan (4) empat sasaran kelompok, yaitu : Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas dan Kelompok Masyarakat Adat. Sebagai sebuah dokumen teknokratik dan amanat Presiden Indonesia, RANHAM harus dilaksanakan disemua jenjang pemerintahan daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

- Maka untuk itu perlu dilakukan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai sarana bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga/instansi dalam pelaksanaan kegiatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.
 - Kegiatan Monev dan Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai sarana bagi aparatur Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memberikan motivasi dalam melaksanakan amanat Undang-Undang 1945 pasal 28 I ayat (4) yang menyatakan bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
 - Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran I
 - b. Sasaran II : Meningkatnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan masyarakat yaitu :
 - 1) Jumlah kasus yang ditangani (Target Kinerja : 10) (Realisasi Kinerja : 12).
 - 2) Jumlah bantuan advokasi hukum yang ditetapkan (Target Kinerja : 8) (Realisasi Kinerja : 8).
 - c. Sasaran III : Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja yaitu :
 - 1) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (Target Kinerja : BB = 71,50) (Realisasi Kinerja : BB = 71,03).
- Pencapaian target dari indikator kinerja tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :
- a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dicapai dengan pelaksanaan kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- (3) Administrasi BMD pada Perangkat Daerah
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- (6) Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- (8) Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Seluruh program dan kegiatan tersebut di atas mendukung pencapaian target kinerja sasaran III.

3. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI						
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90%	100%	100%	37.857.134	37.557.134	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	54.581.000	54.581.000	
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	11.070.000	10.711.610	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	83.668.200	83.522.692	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	953.938.328	883.361.688	
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	134.240.440	132.010.000	
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	100%	2.900.000	2.889.046	
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	57.070.000	55.684.788	
II	FASILITASI DAN KOORDINASI						

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target dalam Dok Anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	HUKUM						
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	90%	100%	100%	353.057.207	331.083.307	
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	100%	342.824.144	281.554.550	

4. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Permasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
I	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
3.	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah			
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
6.	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
8.	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
II.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
1.	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Masih adanya produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru beserta pendanaannya yang masih terbatas	Inventarisir produk hukum daerah yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Mengadakan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan lingkup provinsi, dan kab/kota	
2.	Fasilitasi Bantuan Hukum	Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat dan pemerintah	Mengupayakan akses dan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat dan pemerintah	

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5
		Sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	Mengadakan sosialisasi dan advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah yang masih rendah	

KEPALA BIRO HUKUM



EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741031 199803 1 004